



PEMERINTAH KOTA MALANG

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2023**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 sebagai tindak lanjut dari Renstra Tahun 2019-2023 dan Renja Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Malang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tala Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Adapun maksud penyusunan LAKIP ini adalah untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun, yang berisi informasi mengenai capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan. LAKIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta pembangunan sebagai upaya memperbaiki kinerja organisasi pada masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*good governance and clean government*).

Kami sadar bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mohon maaf dan bersedia menerima semua kritik saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah banyak berperan dalam penyusunan ini kami ucapkan terima kasih.

Malang, 16 Februari 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG**



DE HANDI PRIYANTO, AP., M.Si.

NIP. 19760607 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR LAMPIRAN	III
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	1
C. Gambaran Umum	1
D. Dasar Hukum	8
E. Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang	10
BAB IIPERENCANAAN KINERJA	14
A. Perencanaan Kinerja	14
1. Tujuan dan Sasaran	14
2. Strategi dan Arah Kebijakan	15
B. Indikator Kinerja Utam	17
C. Perjanjian Kinerja	17
D. Standar Penilaian Kinerja	19
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA	20
B. Capaian Kinerja Organisasi	20
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	20
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023	22
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis	24
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)	25
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	28
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	29
7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	30
C. Realisasi Anggaran	37
BAB IVPENUTUP	39

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

PERHITUNGAN PAD	40
-----------------------	----

LAMPIRAN II

BERITA ACARA HASIL EVALUASI NILAI SAKIP	41
---	----

LAMPIRAN III

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	42
-------------------------------------	----

LAMPIRAN IV

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	70
---	----

LAMPIRAN V

Tindak Lanjut Rekomendasi LHE SAKIP 2023	92
--	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dibuat sebagai implementasi Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Pemerintah yang menggantikan Permenpan No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP.

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga, mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalkan penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN dalam penyelenggaraan pembangunan Kota Malang. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Malang atas penggunaan anggaran.

Badan Pendapatan Daerah Kota Malang berusaha menyajikan informasi kinerja melalui LAKIP ini secara berimbang, transparan dan akuntabel atas kinerja yang telah dicapai. Selain itu LAKIP ini digunakan sebagai upaya untuk perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dibentuk dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dan tugas pembantuan lainnya. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2022 terdiri dari :

- a. Kepala Badan;



- b. Sekretariat, terdiri dari :



1. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan



2. Kelompok Jabatan Fungsional;



c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, terdiri dari :



1. Subbidang Perencanaan dan Pembukuan PAD; dan



2. Subbidang Pengembangan Potensi;



d. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari :



1. Subbidang Pajak Daerah I; dan



2. Subbidang Pajak Daerah II;



e. Bidang Pengendalian Pajak Daerah, terdiri dari :



1. Subbidang Pengawasan, Penagihan dan Penindakan; dan



2. Subbidang Pembinaan dan Keberatan;



f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Perencanaan merupakan alat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Perencanaan merupakan pangkal upaya untuk mencapai kinerja visi dan misi daerah. Untuk mendapatkan perencanaan yang baik maka diperlukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan. Sejalan dengan itu saat ini porsi dari perencanaan menjadi sangat dominan sehingga perlu disusun sebuah perencanaan yang berkualitas. Untuk mendukung hal itu Pemerintah Kota Malang melalui RPJMD mengamanatkan :

1. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum;
2. Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif;

3. Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN;
4. Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Malang memberikan tugas kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Malang melalui Perwal Nomor : 48 Tahun 2021 untuk melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan khususnya dalam Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan tugas pembantuan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan Pajak Daerah;
- d. pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
- e. pengoordinasian penerimaan PAD;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan Pajak Daerah;
- g. pembinaan teknis pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang keuangan lingkup pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah;
- h. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- i. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- j. pelaksanaan administrasi di bidang Pendapatan Asli Daerah;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan asli daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang pengelolaan PAD.



Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh seorang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 6 (Enam) orang Kepala sub bidang, 1 (satu) orang Kepala sub bagian, dan beberapa kelompok jabatan fungsional.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan :

Sekretariat, terdiri dari:

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional;

b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, terdiri dari:

- a) Subbidang Perencanaan dan Pembukuan PAD;
- b) Subbidang Pengembangan Potensi;

c. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari:

- a) Subbidang Pajak Daerah I;
- b) Subbidang Pajak Daerah II;

d. Bidang Pengendalian Pajak Daerah, terdiri dari:

- a) Subbidang Pengawasan, Penagihan, dan Penindakan;
- b) Subbidang Pembinaan dan Keberatan;
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Dasar Hukum

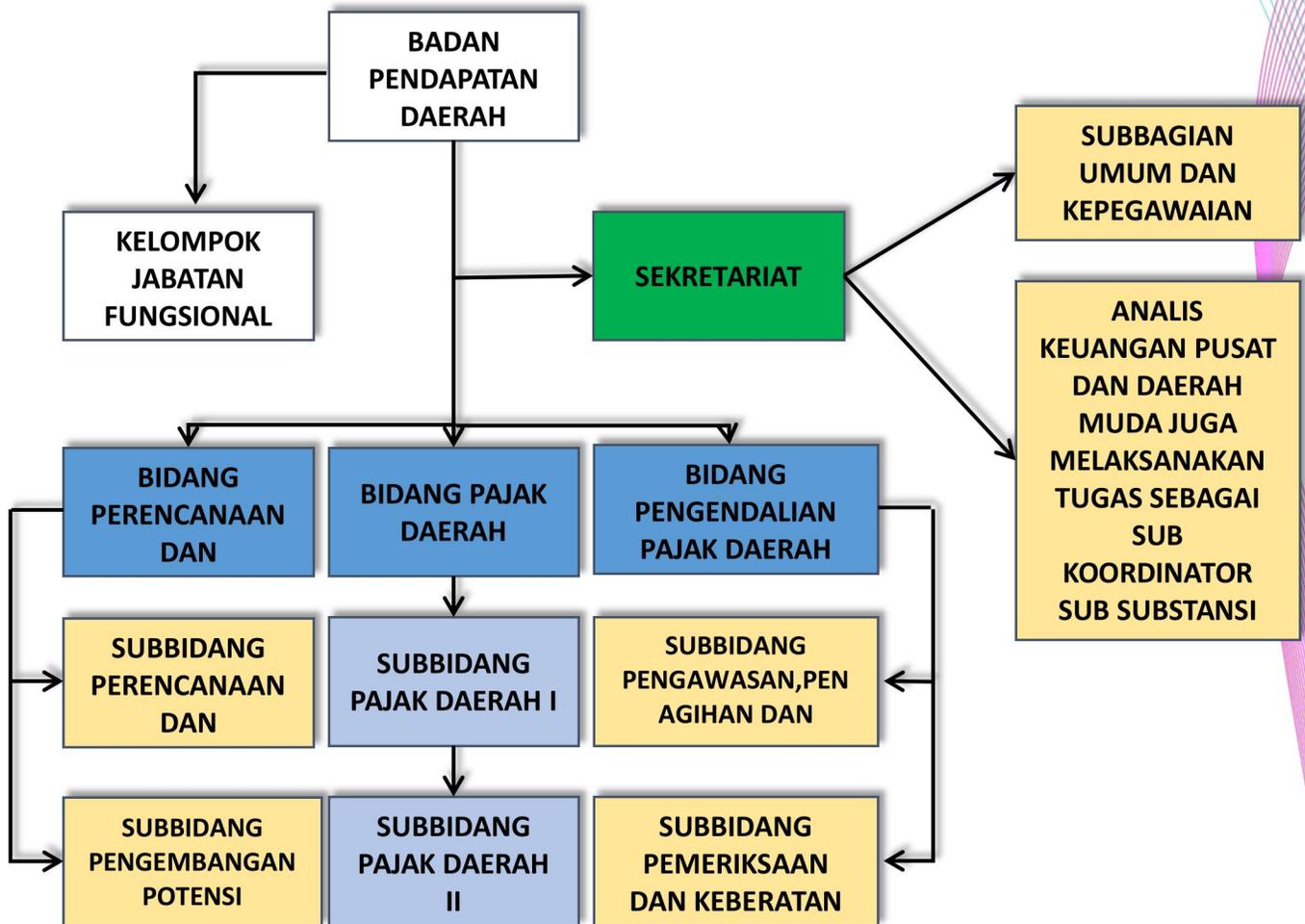
Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
15. Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
17. Perwal Nomor 48 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Malang;

E. Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang

Berdasarkan Perda No. 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang terdiri dari 1 sekretariat dan 3 bidang. Selanjutnya penjabaran organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Malang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 48 tahun 2021 dengan bagan sebagai berikut :



Aspek Strategis dan Permasalahan yang sedang dihadapi

Agar pengelolaan PAD menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan

maupun perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan gagalnya mencapai tujuan.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kota Malang, sehingga menuntut terjadinya peningkatan layanan pada Badan Pendapatan Daerah dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung program pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi, dan program Pemerintah Kota Malang tahun 2018-2023.

Bertolak dari telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis tersebut, dapat digambarkan bahwa isu-isu strategis yang akan berpengaruh terhadap Badan Pendapatan Daerah adalah:

1. Belum optimalnya kapasitas petugas pemungut pajak dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas;
2. Tata kelola penerimaan Pajak Daerah yang kurang efektif dan efisien sehingga berpengaruh pada akuntabilitas dan ketepatan pemenuhan pelaporan keuangan;
3. Belum optimalnya penagihan atas piutang Pajak Daerah yaitu ditandai dengan semakin bertambahnya nilai piutang Pajak Daerah.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi diantaranya :

Beberapa permasalahan yang mengemuka dapat kami identifikasikan sebagai berikut:

1. Mekanisme Menghitung Pajak Sendiri (MPS) memungkinkan wajib pajak kurang terbuka, taat dan jujur dalam pelaporan omset usahanya, sehingga rawan terjadi kebocoran pajak.

2. Akurasi database yang masih perlu ditingkatkan untuk mengetahui secara pasti potensi Pajak Daerah yang ada.
3. Kualitas sumber daya manusia masih banyak yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 6 Tahun 2010, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, rata-rata usia, asal-usul penugasan, dan ethos kerja individual.
4. Belum tersosialisasinya dengan baik tentang Pajak Daerah kepada masyarakat beserta manfaat yang diterima sehingga kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya masih harus ditingkatkan.

Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian Program Nasional/Internasional

1. Kurang maksimalnya pendapatan pajak daerah.
2. Kurang validnya data potensi pajak daerah.
3. Kurang pahamnya aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tantangan yang ada dalam Badan Pendapatan Daerah Kota Malang adalah :

1. Masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dan kurang menyadari kewajibannya membayar pajak
2. Masih adanya Wajib pajak yang membayar pajak tidak sesuai ketentuan
3. Ketidakpastian kondisi ekonomi yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha wajib pajak

Peluang (Opportunity) adalah situasi eksternal Badan Pendapatan Daerah Kota Malang yang berpotensi menguntungkan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dan organisasi lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Peluang tersebut terdiri dari :

1. Jumlah Penduduk yang banyak merupakan peluang pasar bagi setiap usaha yang menjadi obyek pajak.

2. Letak Geografis yang strategis serta iklim sejuk merupakan lokasi yang strategis untuk mendirikan usaha yang dapat menjadi obyek pajak.
3. Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya memiliki cita-cita sebagai Kota Industri, Kota Pendidikan dan Kota Pariwisata, hal tersebut memberikan peluang yang bagus bagi perkembangan berbagai usaha yang berpotensi menjadi obyek pajak seperti usaha hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, dll
4. Perkembangan teknologi informasi yg dapat dimanfaatkan utk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
5. Adanya kerjasama yang baik dengan instansi yang terkait baik vertical maupun horizontal
6. Jumlah Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang banyak dapat membuka peluang kerjasama terkait peningkatan penerimaan pajak daerah
7. Jumlah Bank yang banyak dapat membuka peluang kerjasama dalam pelayanan tempat pembayaran pajak daerah.
8. Pertumbuhan wilayah lebih cepat yg menyebabkan nilai jual tanah dan bangunan makin tinggi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Dimana Renstra ini disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi bidang penerimaan dari sektor pajak daerah. Dengan demikian diharapkan Renstra ini dapat dijadikan pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sejalan dengan visi dan misi yang diemban Walikota Malang, maka tujuan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kota Malang adalah:

**“Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pembiayaan
Pembangunan Melalui Penerimaan PAD”.**

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kota Malang memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud diatas yaitu :

- 1) Optimalisasi Penerimaan PAD
- 2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.1
Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal (2018)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan PAD	Optimalisasi Penerimaan PAD	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30	0.33
		Persentase Capaian PAD	105%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84.87	83	83	83	83	83

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan Visi Dan Misi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah.

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu

ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Badan Pendapatan Daerah telah menetapkan strategi dan arah kebijakan yang didasarkan pada isu strategis yang diangkat.

Isu-Isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kota Malang, sehingga menuntut terjadinya peningkatan layanan pada Badan Pendapatan Daerah dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung program pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi, dan program Pemerintah Kota Malang tahun 2018-2023.

Bertolak pada identifikasi permasalahan, visi, misi, arah kebijakan kepala daerah terpilih, hasil analisa Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis tersebut, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang adalah:

1. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
2. Optimalisasi Kualitas Database Potensi Pajak Daerah
3. Optimalisasi dan Revitalisasi Sumber-Sumber Obyek Pajak Daerah
4. Optimalisasi pelayanan pajak daerah yang terukur dan transparan
5. Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam SK Nomor : 188.45/234/35.73.402/2019 tentang Penetapan IKU di lingkungan Pemerintah kota Malang Tahun 2019-2023

Adapun IKU Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan PAD	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	0,24	0,26	0,28	0,3	0,33
	1.Optimalisasi Penerimaan PAD	Persentase Capaian PAD	100%	100%	100%	100%	100%
	2.Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83	83	83	83	83

- Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah = Realisasi PAD / Realisasi Pendapatan Daerah
- Persentase Capaian PAD = (Realisasi PAD / Target PAD)x 100%

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam perjanjian kinerja memuat informasi tentang sasaran stategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam Tahun 2023 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun perjanjian kinerja yang memuat sasaran stategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam Tahun 2023 dan penyesuaian sasaran stategis dengan merinci indikator kinerja dan target pada perubahan perwal RKPD sesuai dengan Renstra Tahun 2019-2023.

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Kota Malang Tahun 2023 secara rinci adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam
Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan PAD
Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Optimalisasi Penerimaan PAD	Persentase Capaian PAD	100%	Program pengelolaan pendapatan daerah	RP. 15.509.674.276
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	RP. 53.273.800.164

D. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

B. Capaian Kinerja Organisasi.

Pengukuran Capaian Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

- Optimalisasi Penerimaan PAD
- Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut adalah :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Keterangan
Optimalisasi Penerimaan PAD	Persentase Capaian PAD	100%	79.07%	79.07%	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83%	86.25%	104%	
	Rata Rata Capaian			91.54%	

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 91.54% pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 101%.

Dari Tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi PAD belum mencapai 100% dikarenakan hanya 5 (lima) jenis pajak daerah yang mencapai target yaitu :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Reklame;
- c. Pajak Penerangan Jalan;
- d. Pajak Parkir;
- e. Pajak Bumi dan Bangunan;

Sedangkan 4(empat) jenis pajak daerah yang lain tidak memenuhi target yaitu :

- a. Pajak Restoran,
- b. Pajak Hiburan,
- c. Pajak Air Tanah,
- d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

TRIWULAN s.d	TARGET		REALISASI	
	2022	2023	2022	2023
I	100.875.000.000,00	129.825.900.000,00	115.639.466.428,54	111.377.500.377,93
II	223.150.000.000,00	327.601.800.000,00	240.088.869.423,33	258.666.840.355,01
III	371.325.000.000,00	466.550.000.000,00	389.388.492.147,21	434.647.419.227,99
IV	566.000.000.000,00	834.000.000.000,00	547.433.152.366,47	610.377.429.549,81

Dari data tersebut, penerimaan Pajak Daerah tahun 2023 cukup baik dibandingkan dengan penerimaan Pajak Daerah tahun 2022 akan menjadi modal bagi Pemerintah Kota Malang untuk menjaga agar APBD menjadi semakin sehat sehingga bisa melindungi ekonomi, menjaga masyarakat, dan mendukung pembangunan Kota Malang. Ke depan perlu adanya upaya optimalisasi lewat intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi yang dapat diterjemahkan dalam 4 langkah besar yaitu pendataan ulang dan upgrade database perpajakan, pengembangan teknologi informasi yang memadai, penguatan kualitas SDM di Bapenda, serta penguatan inovasi, regulasi, dan kerjasama.

Selain itu terdapat 7 (Tujuh) Jenis Retribusi Daerah yang tidak mencapai target yaitu :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan,
- b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
- c. Retribusi Pelayanan Pasar,
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir,
- f. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
- g. Retribusi Ijin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Nilai Sakip yang dicantumkan adalah Nilai Tahun 2023 penilaian dari tim verifikator inspektorat.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2018-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kondisi awal kinerja	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Optimalisasi Penerimaan PAD	Persen tase Capaian PAD	105%	99.15%	91,07 %	92.59%	100.04%	79.07%	99.15%	91.07%	92.59%	100.04%	79.07%
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84.87	83.26	87.79	85.75	85.75	86.25	100.31%	106%	103.43%	103.43%	104%
Rata-rata capaian								99.73%	98.54%	98,01 %	101.7%	91.54%

Pengukuran kinerja dari tahun 2019 – 2023 untuk menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan kinerja yang dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

a) Sasaran strategis : Optimalisasi Penerimaan PAD

Indikator kinerja 1 : Persentase Capaian PAD;

Dari tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa persentase capaian PAD tahun 2020 menurun sebesar 8.08 % karena adanya pandemi covid 19 dan tahun 2021 mulai naik sebesar 1,52 % karena pandemi covid 19 mulai membaik dan tahun 2022 naik 7% dari tahun 2021 hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi semakin membaik pasca pandemi covid-19. Sedangkan Pada Tahun 2023 mengalami kenaikan secara realisasi capaian pajak daerah dari Tahun sebelumnya namun secara presentase total PAD terhadap target mengalami penurunan dikarenakan adanya peningkatan target yang sangat tinggi di Tahun 2023 dari target sebelumnya.

b) Sasaran strategis : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Indikator kinerja 2 : Nilai SAKIP

Nilai SAKIP selalu melebihi target namun tahun 2021 menurun karena adanya perubahan indikator penilaian yang semakin berat. Pada Tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan karena sudah mulai melakukan pemenuhan kebutuhan kelengkapan SAKIP sesuai dengan indikator yang terbaru.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi termasuk didalamnya realisasi kinerja Tujuan untuk mengukur kinerja *outcome ultimate* selama 5 tahun. Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja				
			2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	2	3	5	6	7	8	9
	Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan PAD	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	0.33	0.26	0.25	0.28	0.34	0.34
1	Optimalisasi Penerimaan PAD	Persentase Capaian PAD	100%	99,15%	91,07 %	92,59%	100,04%	79%
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83	83,26	87,79	85,75	85,75	86,25

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

1) Dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Tabel 3.4
Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
				Target	Realisasi
			2022	2023	2023
1	2	2	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Badan Pendapatan Daerah Kota tidak melaksanakan urusan pemerintahan dasar sehingga tidak terdapat Standar Pelayanan Minimal/standart Nasional Lainnya.

2) Dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

Realisasi Kinerja di Level Nasional dimana Badan Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai unit Kerja Pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) mendapat Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Selain itu juga meraih Top Digital Award 2023 dalam meningkatkan pelayanan digital dengan menjadi Inisiator Aplikasi Persada.



Terima kasih atas dukungan Pimpinan, Seluruh Wajib Pajak dan Semua Pihak yang telah memberikan support sehingga Badan Pendapatan Daerah Kota Malang meraih predikat WBK tahun 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2022."

Dr. Hanah Priyanti, AP, M.S.
Kepala Bappeda Kota Malang

Bappeda Sumbang Kelurahan

Loket Pelayanan Kantor Bappeda

Loket Pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP)

Tax Online Monitoring Room

PIAGAM PENGHARGAAN

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

Memberikan Penghargaan Kepada:

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG

sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Jakarta, 06 Desember 2022

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Abdullah Azwar Anas



Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Kota Malang tumbuh signifikan dari -2,26% (2020) menjadi 4,21% (2021) atau mengalami rebound 6,47 poin persen.



Nilai PDRB
2020 2021
72,16 76,62 +6%
(Dalam Triliun Rupiah)

PDRB Perkapita
2020 2021
85,52 90,68 +6%
(Dalam Juta Rupiah)

2021
4,21%

Komparatif

Nasional	3,69%
Jatim	3,57%
Kota Malang	4,21%
Kota Bandung	3,76%
Kota Surabaya	4,29%
Kota Pekalongan	3,59%

TPAKD AWARD 2020 "OJIR"

OJO PERCOYO KARO RENTENIR
INOVASI TERBAIK NASIONAL
PEMBIAYAAN MELAWAN
RENTENIR



5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan.

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sampai dengan tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Adapun Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah sebagai berikut :

Tujuan 1: Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan PAD, capaian indikator kinerja yaitu Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah dimana Realisasinya senilai 0.36 dari target 0.33 sehingga tercapai 109%. Sesuai target pada Renstra melalui dukungan pencapaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Sasaran Strategis : Optimalisasi Penerimaan PAD
 - a. Indikator 1 : Persentase Capaian PAD telah tercapai 79.07% sesuai dengan realisasi 79.07% dari target 100% hal tersebut termasuk kategori cukup tercapai/Cukup Berhasil. Persentase pencapaian PAD akan lebih di maksimalkan lagi pada tahun berikutnya. Penerimaan PAD yang sudah mencapai lebih dari 100% adalah penerimaan dari Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar 102.77% dan penerimaan Lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar 122.06%. Sedangkan yang belum mencapai 100% adalah penerimaan dari Pajak Daerah terealisasi sebesar 73.19% dan Penerimaan dari Retribusi Daerah terealisasi sebesar 90.47 %.
 - b. Indikator 2 : Nilai Sakip target 83 dengan realisasi sebesar 86.25 . capaian senilai 104% dari target nilai 83 termasuk dalam kategori Tercapai / Berhasil. Pencapaian sakip di Tahun 2023 masuk dalam predikat memuaskan. Komponen capaian Sakip dengan bobot maksimal 30 untuk Komponen Perencanaan Kinerja mendapat nilai 26.10, Komponen Pengukuran Kinerja mendapat nilai 24.60. Pada

Komponen Akuntabilitas Kinerja Internal mendapat nilai 22.50 dari bobot 25 dan mendapat nilai 13.05 untuk komponen Pelaporan Kinerja dari bobot 15. Untuk capaian tahun berikutnya akan lebih dimaskimalkan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.5
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
Optimalisasi Penerimaan PAD	Persentase Capaian PAD	100%	79%	79%	53.273.800.164	39.838.162.443	75%	105,7%
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83	86,25	104%	15.509.674.276	14.694.669.059	95%	110%
Rata - Rata				91%	34.391.737.220	27.266.415.751	85%	108%

**Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif
< 100%, maka penggunaan dana belum efektif**

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- 1) Indikator Persentase Capaian PAD target sesuai dengan ketentuan 100% dengan capaian kinerja 79 % dan Capaian Anggaran 75% menunjukkan bahwa ada efisiensi anggaran 4% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 105,7%
- 2) Indikator Nilai Sakip target 83 dengan realisasi 86.25 dengan capaian kinerja 104% dan Capaian anggaran 95% menunjukkan adanya efisiensi anggaran 9% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 110%.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Tabel 3.6
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian	Rencana tindak lanjut
		(%)					(%)	
Optimalisasi Penerimaan PAD	Persentase Capaian PAD	100%	Program pengelolaan pendapatan daerah	Rasio PAD	0,33	0,34	103%	
				Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	83,44%	79%	94,7%	
				Persentase penurunan piutang pajak daerah	18,70%	14%	75%	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	100%	125%	
				Nilai Survey Kepuasan Internal	80	81	101%	
				Nilai Sakip	83	86.25	104%	

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah sebagai berikut :

- Proses Penyusunan Regulasi yang berkaitan dengan Pajak Daerah yang masih berjalan yaitu perubahan tarif Pajak Air Tanah;



- Kegiatan Gebyar Sadar Pajak, Sambang Kelurahan, Relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi PBB dan Pajak Daerah Lainnya, membuka loket pelayanan di Ijen Car Free Day, Gathering Wajib Pajak;



- Penyesuaian NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) berbasis harga pasar yang berdampak pada peningkatan BPHTB tanpa menaikkan PBB;
- Pemasangan e-tax di restoran, hotel, tempat hiburan dan tempat parkir yang hingga per Bulan Februari 2024 sebanyak 974 Lokasi ;



- Melakukan Operasi Gabungan dengan SatpolPP secara rutin,



- Penyampaian Himbauan percepatan Pembayaran PBB dan BPHTB pada masyarakat maupun notaris;
- Pendataan secara intensif pada jenis Pajak daerah Lainnya serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi secara berkelanjutan;



- Penagihan dan pemeriksaan secara intensif dan terus menerus kepada Wajib Pajak yang berpotensi melakukan ketidaksesuaian pelaporan omzet;



- Melakukan Penyusunan Kajian Potensi Pajak dan Kajian Potensi Retribusi;
- Melakukan Sinergitas dan kolaborasi antarlini yaitu Fasilitasi Kerjasama dibidang Perpajakan Daerah dengan Bank Jatim, Kejaksaan Negeri Malang, Badan Pertanahan Nasional Kota Malang, Kanwil DJP Jatim 3, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dan Selatan, Perusahaan Listrik Negara, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang yang terkait lainnya;

- Melakukan Rekonsiliasi dan Monev secara rutin berkala dan berkelanjutan bersama dengan Komisi B DPRD serta semua perangkat daerah pemungut PAD;
- Pendampingan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.



Tabel 3.7
Analisa Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Program/Kegiatan

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN %	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian %	Rencana Tindak Lanjut	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100%		
	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	1,25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%		
	Nilai Survey Kepuasan Internal	101%	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%		
	Nilai Sakip	104%	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	161 Dokumen	175 Dokumen	109%		

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	87 Pegawai	85 Pegawai	98%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	161 Dokumen	175 Dokumen	109%		
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	16 Unit	16 Unit	100		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	16 Unit	16 Unit	100		
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	86	59	69%		

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	86 Orang	59 Orang	69%	Sesuai kegiatan yang diadakan oleh BKPSDM	Mengupayakan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk seluruh ASN di Bapenda Kota Malang
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi umum	141	224	159%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 Paket	3 Paket	100		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	10 Paket	8 Paket	80%	Terdapat 2 paket yang tidak dicairkan	Lebih memaksimalkan penyerapan anggaran di Tahun 2024
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	2 Paket	2 Paket	100%		

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 Paket	3 Paket	100%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11 Jenis	11 Jenis	100%		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 Laporan	185 Laporan	185%		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan gedung kantor	10	12	120%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah peralatan gedung kantor	10 Jenis	12 Jenis	120%		

			Lainnya						
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Surat	5000	7511	150%		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	5000 Surat	7511 Surat	150%		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	850 m2	850 m2	100%		

		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	96	84	88%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas/operasional	80 unit	73 Unit	91%	7 kendaraan bayar pajak pada tahun 2024 karena kendaraan baru	akan dilaksanakan di 2024
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	10 jenis	10 Jenis	100%		
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	3 Unit	50%	3 Gedung yang terpelihara meliputi :	Lebih memaksimalkan pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran di Tahun 2024

								- Gedung B	
								- Gedung Arsip	
								- Gedung Control Room	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD	109%	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		9 Jenis	9 Jenis	100%		
	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	95%	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen hasil analisa pengembangan daerah serta dokumen penyusunan kebijakan pajak daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%		
	Persentase penurunan piutang pajak daerah	75%	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang tersosialisasi	80000 Wajib Pajak	103963 Wajib Pajak	130%		

		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi dan terpelihara	4 Aplikasi	8 Aplikasi	200%		
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah	1200 Wajib Pajak	1200 Wajib Pajak	100%		
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah I & II	321508 Berkas	321508 Berkas	100%		
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah penetapan wajib pajak daerah	60000 Wajib Pajak	60000 Wajib Pajak	100%		
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	40000 Wajib Pajak	40000 Wajib Pajak	100%		

			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah piutang yang tertagih	Rp59,997,860,546.98	Rp41,264,556,587	69%	- Banyak wajib pajak (PDL) yang tutup tetapi tidak melakukan pelaporan penutupan sehingga menambah piutang	- Melakukan verlap internal dengan mendatangi langsung lokasi yang tutup dan melaporkan pada bidang penetapan
								- Untuk Wajib Pajak PBB banyak objek yang masih berupa tanah kosong dan bangunan tak berpenghuni sehingga	- Melakukan verlap agar mengetahui nama pemilik dan bisa melakukan penagihan tunggakan

								a sulit untuk melakukan penagihan	
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah keberatan dan sengketa pajak daerah yang terselesaikan/diproses	900 Wajib Pajak	792 Wajib Pajak	88%		Banyaknya wp yang ditetapkan secara jabatan, tetapi keberatan untuk melakukan pembayaran	Melakukan pendekatan secara persuasif kepada WP agar membayarkan tunggakan dan memberikan sosialisasi tentang pembayaran pajak daerah
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang diperiksa dan dilakukan pengawasan	1300 Wajib Pajak	1987 Wajib Pajak	153%			
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%			

1) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :

Sasaran 1 : Optimalisasi Penerimaan PAD

Indikator 1 : Rasio PAD

Prosentase pencapaian Rasio PAD dengan target 0.33 telah berhasil tercapai sebesar 0.34 atau tercapai 103%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Indikator 2 : Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah .

Prosentase pencapaian PAD dengan target 83.44% telah berhasil tercapai sebesar 79% atau tercapai 94,7%%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Indikator 3 : Persentase penurunan piutang pajak daerah .

Persentase penurunan piutang pajak daerah dengan target 18.70% telah berhasil tercapai sebesar 14% atau tercapai 75%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator 1 : Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu. Dengan target 100% tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Indikator 2 : Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik.

Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik dengan target 80% tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;

Indikator 3 : Nilai Survey Kepuasan Internal

Nilai Survey Kepuasan Internal dengan target 80% dapat tercapai dengan 81% Dengan persentase capaian 101%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Indikator 4 : Nilai Sakip

Nilai Sakip dengan target 83 telah tercapai 86.25 Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2) Upaya Perbaikan Pada Perencanaan Berikutnya

Saat ini sedang dilakukan proses penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang saat ini sedang menunggu Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah.

Selain Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saat ini sedang dilakukan proses penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penetapan Besaran NJKP untuk Penghitungan PBB P2 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pemberian Stimulus PBB P2.

Upaya yang masih rutin dilakukan dengan mengadakan Sosialisasi terkait Pajak, Pemberian Reward kepada Wajib Pajak, pengadaan program sunset policy berupa penghapusan sanksi administrasi pajak daerah, kegiatan sambang kelurahan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam proses pembayaran pajak maupun dalam rangka pelayanan pajak daerah, dan pembayaran *open payment* untuk memberikan kemudahan untuk akses pembayaran Wajib Pajak, kegiatan Gebyar Sadar Pajak, melakukan kegiatan opsgab kepada beberapa Wajib Pajak, mengusulkan tenaga fungsional untuk pemeriksa, penilai PBB, dan juru sita sesuai PP No. 35 Tahun 2023

C. Realisasi Anggaran.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 79% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2023

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	%
BELANJA DAERAH	68,783,474,440.00	54,532,831,502.00	79.28%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	53,273,800,164.00	39,838,162,443.00	74.78%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	765,109,000.00	620,480,300.00	81.10%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	152,700,000.00	151,372,500.00	99.13%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	612,409,000.00	469,107,800.00	76.60%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33,622,413,966.00	22,703,826,952.00	67.53%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33,320,129,706.00	22,426,858,612.00	67.31%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	302,284,260.00	276,968,340.00	91.63%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200,178,450.00	197,614,450.00	98.72%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200,178,450.00	197,614,450.00	98.72%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	580,775,000.00	416,413,160.00	71.70%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	580,775,000.00	416,413,160.00	71.70%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,762,840,185.00	4,102,330,912.00	86.13%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53,485,000.00	52,463,695.00	98.09%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	913,342,285.00	859,013,056.00	94.05%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	789,287,000.00	686,639,092.00	86.99%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,418,741,900.00	1,259,938,925.00	88.81%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75,180,000.00	73,680,000.00	98.00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	580,687,000.00	452,282,423.00	77.89%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	932,117,000.00	718,313,721.00	77.06%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,393,250,375.00	6,916,348,856.00	93.55%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7,393,250,375.00	6,916,348,856.00	93.55%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,748,209,484.00	1,451,220,351.00	83.01%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	189,362,203.00	175,839,040.00	92.86%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	930,391,597.00	704,862,911.00	75.76%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	628,455,684.00	570,518,400.00	90.78%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,201,023,704.00	3,429,927,462.00	81.65%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,917,527,704.00	1,805,023,842.00	94.13%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	519,646,000.00	466,678,000.00	89.81%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,763,850,000.00	1,158,225,620.00	65.66%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	15,509,674,276.00	14,694,669,059.00	94.75%
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	15,509,674,276.00	14,694,669,059.00	94.75%
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	496,426,560.00	479,107,460.00	96.51%
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2,894,621,712.00	2,847,627,800.00	98.38%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	778,804,816.00	644,231,034.00	82.72%
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1,200,863,040.00	776,935,140.00	64.70%
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan BasisData Pajak Daerah	758,667,040.00	734,811,840.00	96.86%
Penetapan Wajib Pajak Daerah	2,768,497,600.00	2,749,722,600.00	99.32%
Penelitian dan verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	818,138,520.00	761,430,244.00	93.07%
Penagihan Pajak Daerah	3,134,887,120.00	3,121,515,416.00	99.57%
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	349,234,176.00	332,517,772.00	95.21%
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	363,755,136.00	360,155,036.00	99.01%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1,945,778,556.00	1,886,614,717.00	96.96%

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah kota Malang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis serta sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Malang maka yang menjadi pertanggungjawaban Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang hanyalah pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan pada perhitungan capaian kinerja yang digambarkan dalam pengukuran kinerja jangka pendek dalam tahun 2023 termasuk kategori BERHASIL. Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara capaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dari perhitungan analisis dan penilaian terhadap capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Malang ternyata telah menyelenggarakan pemerintahan secara umum sesuai dengan rencananya sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan strategis. Hal ini terlihat dari pencapaian 1 (satu) sasaran 2 (dua) Indikator yang telah direncanakan.

Malang,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG



DI. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si
NIP. 19760607 199412 1 001

LAMPIRAN I
PERHITUNGAN PAD

- Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah = Realisasi PAD / Realisasi Pendapatan Daerah
- Persentase Capaian PAD = (Realisasi PAD / Target PAD)x 100%

INDIKATOR	FORMULA	CAPAIAN	CAPAIAN
Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Realisasi PAD / Realisasi Pendapatan Daerah	Rp. 792.120.013.218,17 ÷ Rp.2.344.815.945.277,81	0,34
Persentase Capaian PAD	(Realisasi PAD / Target PAD)x 100%	(Rp. 792.120.013.218,17 ÷ Rp.1.001.792.007.861)x100%	79,07%

LAMPIRAN II
BERITA ACARA HASIL EVALUASI NILAI SAKIP



PEMERINTAH KOTA MALANG
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Gajahmada No. 2A Telp / Fax. (0341) 364450 Kode Pos.65119
MALANG

BERITA ACARA
HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023

Pada hari Senin tanggal Sembilan belas Juni Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilakukan klarifikasi terhadap hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 pada **Badan Pendapatan Daerah** Kota Malang. Adapun hasil Evaluasi SAKIP diperoleh **Total Nilai sebesar 86,25 (Predikat A : Memuaskan)** dengan rincian nilai tiap komponen sebagai berikut :

1. Komponen Perencanaan Kinerja dengan nilai 26,10 dari bobot 30
2. Komponen Pengukuran Kinerja dengan nilai 24,60 dari bobot 30
3. Komponen Pelaporan Kinerja dengan nilai 13,05 dari bobot 15
4. Komponen Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 22,50 dari bobot 25

Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP tersebut di atas maka ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam dokumen SAKIP maupun implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penyajian dokumen seluruh komponen SAKIP dan diupload pada aplikasi Kemenpan RB (<https://esr.menpan.go.id>) secara berkelanjutan 5 (lima) tahun terakhir untuk meningkatkan capaian nilai setiap komponen.
2. Mempublikasi setiap inovasi dan penghargaan nominasi regional maupun nasional dalam website resmi perangkat daerah.

Evaluator :

1. NINOK TRI SUGESTI,S.Sos :
2. GALIH HIMAWANTO,ST :

Perangkat Daerah :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG

Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760607 199412 1 001

LAMPIRAN III
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA MALANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. HANDI PRIYANTO, A.P., M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. H. SUTIAJI
Jabatan : WALIKOTA MALANG
Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


WALIKOTA MALANG,
Drs. H. SUTIAJI

Malang, 2 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Dr. HANDI PRIYANTO, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19760607 199412 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase capaian PAD	100%
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 73.211.515.486,00	PAD Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	RP. 15.679.742.832,00	PAD
JUMLAH		Rp. 88.891.258.318,00	



Malang, 2 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Dr. HANDI PRIYANTO, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19760607 199412 1 001



**PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
Malang 65132



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUYUN NANIK EKOWATI, S.STP, M.Si**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Dr. HANDI PRIYANTO, A.P., M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN**

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,**

Dr. HANDI PRIYANTO, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19760607 199412 1 001

**SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA MALANG,**

YUYUN NANIK EKOWATI, S.STP,M.Si
Pembina Tk. I
NIP.19800111 199810 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	1. Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu; 2. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik; 3. Nilai Survey Kepuasan Internal.	100% 100% 80

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	636.460.000,00	PAD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.064.695.100,00	PAD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	211.800.000,00	PAD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	299.300.000,00	PAD
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.702.416.149,00	PAD
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.680.071.654,00	PAD
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.697.598.879,00	PAD
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.919.173.704,00	PAD
JUMLAH		73.211.515.486,00	

Malang, Januari 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,**

DR. HANDI PRIYANTO, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700007 199412 1 001

**SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA MALANG,**

YUYUN NANIK EKOWATI, S.STP.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19800111 199810 2 002



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
Malang 65132



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JULI HANDAYANI, S.E.,MM**
Jabatan : SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAAN

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **YUYUN NANIK EKOWATI, S.STP, M.Si**
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2023

SEKRETARIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,

YUYUN NANIK EKOWATI, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19800111 199810 2 002

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAAN

JULI HANDAYANI, S.E.,MM
Penata Tingkat I
NIP. 19790720 201001 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah sesuai ketentuan	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	71 Unit
2	Terlaksananya pendidikan pelatihan ASN sesuai dengan kebutuhan	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	40 ASN
3	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu sesuai kebutuhan	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	12 Kali
4	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9 Jenis
5	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai Kebutuhan	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	9 Kali
6	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	15 Jenis
7	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	Jumlah alat tulis kantor	67 Jenis
8	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi sesuai kebutuhan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	24 Kali
9	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik : TArget 12 bulan	12 bulan
10	Terlaksananya Penyediaan Jasa	Luasan ruangan yang dibersihkan	850 M2

11	yang responsif Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	5000 surat
12	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sesuai kebutuhan	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara : Target 9 Jenis	9 Jenis
13	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas yang tepat waktu	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara	71 Jenis
14	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai RKBMD	Jumlah peralatan gedung kantor : Target 15 Jenis	15 Jenis

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	211.800.000,00	PAD
	a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	211.800.000,00	PAD
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	299.300.000,00	PAD
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	299.300.000,00	PAD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.702.416.149,00	PAD
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.405.000,00	PAD
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	704.108.250,00	
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	441.582.000,00	
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.103.741.900,00	
	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,00	
	f. Fasilitasi Kunjungan Tamu	501.461.999,00	
	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	882.117.000,00	
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.680.071.654,00	PAD
	a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.680.071.654,00	PAD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.697.598.879,00	PAD
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	191.656.048,00	PAD
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	900.391.597,00	
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	605.551.234,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.919.173.704,00	PAD
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.717.527.704,00	PAD
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	201.646.000,00	
JUMLAH	16.510.360.386,00	

Malang, Januari 2023

SEKRETARIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,



YUYUN NANIK EKOWATI, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19800111 199810 2 002

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAAN



JULI HANDAYANI, S.E.,MM
Penata Tingkat I
NIP. 19790720 201001 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. LAILI ELISA, M.Si**
 Jabatan : **ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA JUGA MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **YUYUN NANIK EKOWATI, S.STP, M.Si**
 Jabatan : **SEKRETARIS**

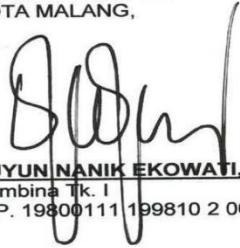
Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2023

SEKRETARIS
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOTA MALANG,



YUYUN NANIK EKOWATI, S.STP, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19800111 199810 2 002

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
 MUDA JUGA MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI
 SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI
 PERENCANAAN DAN KEUANGAN
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOTA MALANG,



Dra. LAILI ELISA M.Si
 Pembina
 NIP. 19690225 199403 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG
SEKRETARIAT

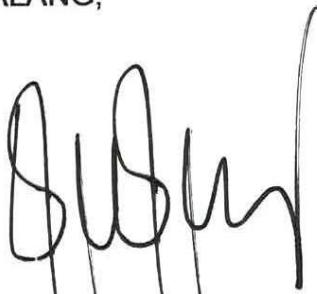
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA JUGA MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tepat waktu	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat, Jumlah sertifikasi, Jumlah ZI	4 Dokumen
2	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai ketentuan	Jumlah dokumen Renja/RKT & Renstra	3 Dokumen
3	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan Bapenda yang tepat waktu	Jumlah penyusunan laporan keuangan Bapenda yang tepat waktu	161 Dokumen
4	Terlaksananya administrasi gaji dan tunjangan PNS tepat waktu	Jumlah ASN	75 ASN
5	Terlaksananya Laporan Keuangan dan PAD	Jumlah Laporan Keuangan dan PAD	2 Dokumen

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (RP.)	Sumber Dana
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	636.460.000,00	PAD
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	202.700.000,00	PAD
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	433.760.000,00	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.064.695.100,00	PAD
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55.862.410.840,00	PAD
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	202.284.260,00	
	JUMLAH	56.701.155.100,00	

Malang, Januari 2023

SEKRETARIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,



YUYUN NANIK EKOWATI, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19800111 199810 2 002

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
MUDA JUGA MELAKSANAKAN TUGAS
SEBAGAI SUB KOORDINATOR SUB
SUBSTANSI PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,



Dra. LAILI ELISA M.Si
Pembina
NIP. 19690225 199403 2 009



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai 1 (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
MALANG Kode Pos 65132

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DWI CAHYO TEGUH YUWONO, S.Sos.,MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PAD

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA MALANG**

Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760607 199412 1 001

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN PAD
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG**

DWI CAHYO TEGUH Y., S.Sos.,MM
Pembina
NIP. 19660228 199003 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PAD**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya potensi Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	17,23 %

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 2.940.532.932,00

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH KOTA MALANG**

Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19760607 199412 1 001

Malang, Januari 2023

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
 PENGEMBANGAN PAD
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOTA MALANG**

DWI CAHYO TAGUH Y., S.Sos., MM
 Pembina
 NIP. 19660228 199003 1 008



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai 1 (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
M A L A N G Kode Pos 65132

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : GEBYAR SRIMINTARTI, S.Pd, M.AP.

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBUKUAN PAD

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DWI CAHYO TEGUH YUWONO, S.Sos.,MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PAD

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2023

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN PAD
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG**

**KEPALA SUB BIDANG
PERENCANAAN DAN PEMBUKUAN PAD
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG**


DWI CAHYO TEGUH Y., S.Sos., MM
Pembina
NIP. 19660228 199003 1 008


GEBYAR SRIMINTARTI, S.Pd., M.AP
Pembina
NIP. 19790430 200312 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PAD
SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PEMBUKUAN PAD

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Perencanaan dan Pengembangan PAD)	1. Jumlah kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Perencanaan dan Pengembangan PAD)	1 Sub Kegiatan
2.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp 1.665.298.556,00
	Jumlah	Rp 1.665.298.556,00

Malang, Januari 2023

KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PAD
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG

KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBUKUAN PAD
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG


DWI CAHYO TYGUH Y.,S.Sos.,MM
Pembina
NIP. 19660228 199003 1 008


GEBYAR SRIMITARTI,S.Pd.,M.AP
Pembina
NIP. 19790430 200312 2 010



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai 1 (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
M A L A N G Kode Pos 65132

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : NANANG SWEISTINURA, S.AB

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DWI CAHYO TEGUH YUWONO, S.Sos.,MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PAD

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

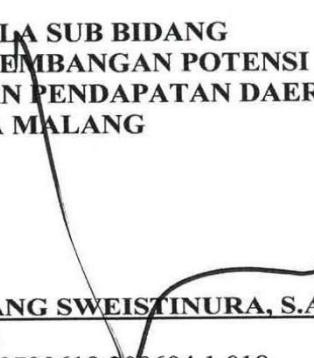
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2023

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN PAD
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG**

**KEPALA SUB BIDANG
PENGEMBANGAN POTENSI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG**


DWI CAHYO TEGUH Y.,S.Sos.,MM
Pembina
NIP. 19660228 199003 1 008


NANANG SWEISTINURA, S.AB
Penata
NIP. 19790618 200604 1 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PAD
SUBBIDANG PENGEMBANGAN POTENSI

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Perencanaan dan Pengembangan PAD)	1. Jumlah kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Perencanaan dan Pengembangan PAD)	2 Sub Kegiatan
2.	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2. Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen
3.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 4. Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah yang terintegrasi dan terpelihara	4 Aplikasi

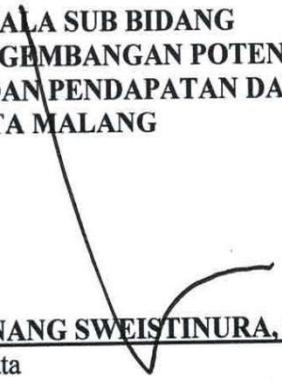
No.	Kegiatan	Anggaran
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 496.429.560,00
2	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah	Rp 778.804.816,00
	Jumlah	Rp 1.275.234.376,00

Malang, Januari 2023

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PAD
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOTA MALANG**

**KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOTA MALANG**


DWICAHYO TEGUH Y., S.Sos., MM
 Pembina
 NIP. 19660228 199003 1 008


NANANG SWEISTINURA, S.AB
 Penata
 NIP. 19790618 200604 1 018



**PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 MALANG Kode Pos 65132

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DWI HERMAWAN PURNOMO, S. STP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PAJAK DAERAH**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG**

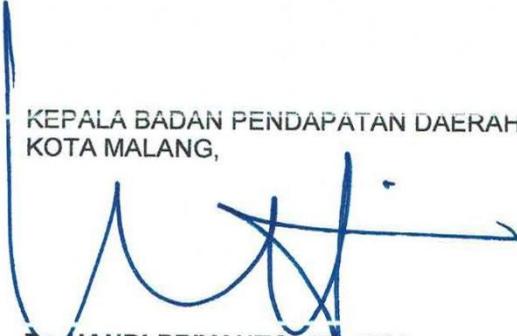
Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

MALANG, 02 JANUARI 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,


Dr. HANDI PRIYANTO, AP, MS.i
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760607 199412 1 001

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,


DWI HERMAWAN PURNOMO, S. STP
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19800116 199810 1 001

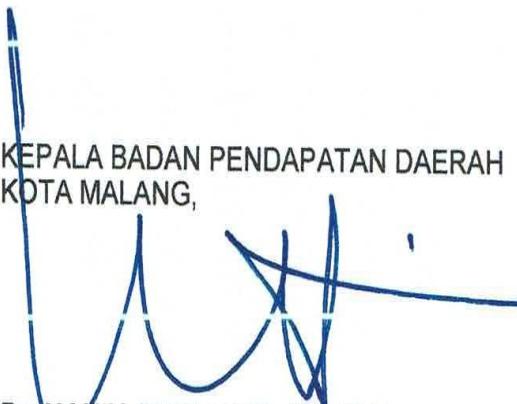
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 BIDANG PENGENDALIAN PAJAK DAERAH
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya Piutang Pajak Daerah	Presentase Penurunan Piutang Pajak Daerah	26,21 %

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah:

Rp. 4.651.183.000

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOTA MALANG,


Dr. HANDI PRIYANTO, AP, MS.i
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19760607 199412 1 001

MALANG, 02 JANUARI 2023

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
 PAJAK DAERAH
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOTA MALANG,


DWI HERMAWAN PURNOMO, S. STP
 Penata Tk.I (III/d)
 NIP. 19800116 199810 1 001



PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 MALANG Kode Pos 65132

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIDIT EDY SUPRIYADI, SE, MM**

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN, PENAGIHAN DAN PENINDAKAN

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **DWI HERMAWAN PURNOMO, S. STP**

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PAJAK DAERAH

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

MALANG, 02 JANUARI 2023

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PAJAK
DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,

DWI HERMAWAN PURNOMO, S. STP
Penata Tk.I (II/d)
NIP. 19800116 199810 1 001

KEPALA SUB BIDANG
PENGAWASAN, PENAGIHAN
DAN PENINDAKAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,

DIDIT EDY SUPRIYADI, SE, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19650323 199901 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 BIDANG PENGENDALIAN PAJAK DAERAH
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pengendalian Pajak Daerah)	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pengendalian Pajak Daerah)	2 Sub Kegiatan
2.	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2300 Dokumen
3.	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2500 Dokumen

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Rp. 244.555.136
2. Penagihan Piutang Pajak Daerah Rp. 3.229.887.120

Jumlah : Rp. 3.474.442.256

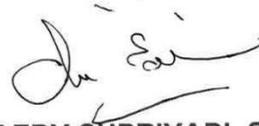
MALANG, 02 JANUARI 2023

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PAJAK
 DAERAH
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOTA MALANG,



DWI HERMAWAN PURNOMO, S. STP
 Penata Tk.I (III/d)
 NIP. 19800116 199810 1 001

KEPALA SUB BIDANG
 PENGAWASAN, PENAGIHAN DAN
 PENINDAKAN
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOTA MALANG,



DIDIT EDY SUPRIYADI, SE,MM
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19650323 199901 1 002



PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 MALANG Kode Pos 65132

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TURUT SETIAJI, SE**

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN KEBERATAN

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **DWI HERMAWAN PURNOMO, S. STP**

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PAJAK DAERAH

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

MALANG, 02 JANUARI 2023

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PAJAK
DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,


DWI HERMAWAN PURNOMO, S. STP
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19800116 199810 1 001

KEPALA SUB BIDANG
PEMBINAAN DAN KEBERATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,


TURUT SETIAJI, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19760306 199703 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 BIDANG PENGENDALIAN PAJAK DAERAH
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pengendalian Pajak Daerah)	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pengendalian Pajak Daerah)	2 Sub Kegiatan
2.	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	900 Dokumen
3.	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	7 Laporan

Sub Kegiatan :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Rp. 2.673.740.000 |
| 2. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Rp. 267.021.984 |

Jumlah : Rp. 2.940.761.984

MALANG, 02 JANUARI 2023

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PAJAK
 DAERAH
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOTA MALANG,

KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN
 DAN KEBERATAN
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOTA MALANG,


DWI HERMAWAN PURNOMO, S. STP
 Penata Tk.I (III/d)
 NIP. 19800116 199810 1 001


TURUT SETIAJI, SE
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP. 19760306 199703 1 005



PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
Malang 65132

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUKO KURNIANTO, SE, M.PA**
Jabatan : KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si**
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

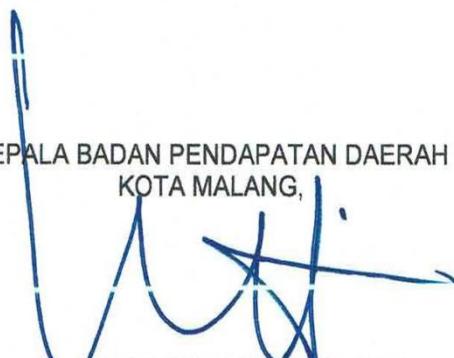
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 2 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,


DR. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760607 199412 1 001

KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,


SUKO KURNIANTO, SE, M.PA
Pembina
NIP. 19750917 199803 1 004



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
Malang 65132

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PAJAK DAERAH

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tercapainya Target Pajak Daerah	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	84,16%

Program / Kegiatan

Anggaran

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rp. 6.324.005.660,00

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,

Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19760607 199412 1 001

Malang, 2 Januari 2023

KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,

SUKO KURNIANTO, SE, M.PA

Pembina
NIP. 19750917 199803 1 004



PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
Malang 65132

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HENDRO TRI YULIANTO, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG PAJAK DAERAH I**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **SUKO KURNIANTO, SE., MPA.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH**

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 2 Januari 2023

KEPALA BIDANGPAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,

SUKO KURNIANTO, SE., MPA.

Pembina

NIP. 19750917 199803 1 001

KEPALA SUB. BIDANG PAJAK DAERAH I
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,

HENDRO TRI YULIANTO, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19680707 199602 1 001



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
Malang 65132

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PAJAK DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Subbidang Pajak Daerah I	Jumlah jenis Pajak Daerah yang dikelola	2 Jenis Pajak
2	Terlaksananya Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan
3	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	18.000 Dokumen

Sub. Kegiatan

Anggaran

1. Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp. 1.522.364.100,00
2. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp. 2.782.640.000,00
Jumlah :	Rp. 4.305.004.100,00

Malang, 2 Januari 2023

KEPALA BIDANGPAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,

SUKO KURNIANTO, SE., MPA.

Pembina

NIP. 19750917 199803 1 001

KEPALA SUB. BIDANG PAJAK DAERAH I
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,

HENDRO TRI YULIANTO, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19680707 199602 1 001



PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
Malang 65132

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAMDHANI ADHY PRADANA, S. STP.**

Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG PAJAK DAERAH II**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **SUKO KURNIANTO, SE, M. PA.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH**

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 2 Januari 2023

KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,

SUKO KURNIANTO, SE, M.P.A.

Pembina

NIP. 19750917 199803 1 004

KEPALA SUB. BIDANG PAJAK DAERAH II
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,

RAMDHANI ADHY PRADANA, S. STP.

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19930308 201507 1 001



PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang

Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
Malang 65132

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIDANG PAJAK DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Subbidang Pajak Daerah II	Jumlah Jenis Pajak Daerah yang dikelola	7 Jenis Pajak
2	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	40.000 Laporan
3	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	40.000 Dokumen

Sub Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Anggaran

- Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah II Rp. 1.200.863.040,00
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Rp. 818.138.520,00

Malang, 2 Januari 2023

KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,

SUKO KURNIANTO, SE, M.PA.

Pembina

NIP. 19750917 199803 1 004

KEPALA SUB. BIDANG PAJAK DAERAH II
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,

RAMDHANI ADHY PRADANA, S. STP.

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19930308 201507 1 001

LAMPIRAN IV

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	1. Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu; 2. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik; 3. Nilai Survey Kepuasan Internal.	100% 100% 80

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	765.109.000,00	PAD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.622.413.966,00	PAD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200.178.450,00	PAD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	580.775.000,00	PAD
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.762.840.185,00	PAD
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.393.250.375,00	PAD
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.748.209.484,00	PAD
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.201.023.704,00	PAD
JUMLAH		53.273.800.164,00	

Malang, September 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,**

**SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA MALANG,**


Dr. HANDI PRIYANTO, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19760607 199412 1 001


Ir. ENY HANDAYANI, M.Si
Pembina Tk. I
NIP.19691020 199602 2 002



**PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH**
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang

Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
Malang 65132



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. LAILI ELISA, M.Si**
Jabatan : **ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA JUGA MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Ir. ENY HANDAYANI, M.Si**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, September 2023

SEKRETARIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
MUDA JUGA MELAKSANAKAN TUGAS
SEBAGAI SUB KOORDINATOR SUB
SUBSTANSI PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,

Ir. ENY HANDAYANI, M.Si
Pembina Tk. I
NIP.19691020 199602 2 002

Dra. LAILI ELISA M.Si
Pembina
NIP. 19690225 199403 2 009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG
SEKRETARIAT
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA JUGA MELAKSANAKAN
TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI PERENCANAAN
DAN KEUANGAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen
2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
3	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen
4	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan keuangan yang tersusun	161 Dokumen
5	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 ASN/Bulan
6	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	161 Dokumen
7	Terlaksananya Laporan Keuangan dan PAD	Jumlah Laporan Keuangan dan PAD	2 Dokumen

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (RP.)	Sumber Dana
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	765.109.000,00	PAD
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	152.700.000,00	PAD
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	612.409.000,00	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.622.413.966,00	PAD
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.320.129.706,00	PAD
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	302.284.260,00	
	JUMLAH	34.387.522.966,00	

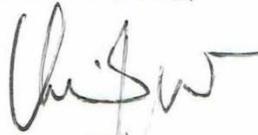
Malang, September 2023

SEKRETARIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,



Ir. ENY HANDAYANI, M.Si
Pembina Tk. I
NIP.19691020 199602 2 002

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
MUDA JUGA MELAKSANAKAN TUGAS
SEBAGAI SUB KOORDINATOR SUB
SUBSTANSI PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,



Dra. LAILI ELISA M.Si
Pembina
NIP. 19690225 199403 2 009



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang

Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun

www.bapenda.malangkota.go.id | email : bppd@malangkota.go.id

Malang 65132



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RIZAL AGUSPUTRA, S.STP.,M.AP

Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PAD

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Oktober 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA MALANG**

Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19760607 199412 1 001

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN PAD
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG**

RIZAL AGUSPUTRA, S.STP.,M.AP

Penata

NIP. 19920101 201406 1 001



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang

Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
www.bapenda.malangkota.go.id | email : bppd@malangkota.go.id

Malang 65132



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PAD

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya potensi Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	17,23 %

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 3.221.012.932,00

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA MALANG**

Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760607 199412 1 001

Malang, Oktober 2023

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN PAD
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG**

RIZAL AGUSPUTRA, S.STP.,M.AP
Penata
NIP. 19920101 201406 1 001



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang

Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun

www.bapenda.malangkota.go.id | email : bppd@malangkota.go.id

Malang 65132



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SRI WAHYUNI, S.Sos., M.AP.

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBUKUAN PAD

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : RIZAL AGUSPUTRA, S.STP.,M.AP

Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PAD

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Oktober 2023

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN PAD
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG**

RIZAL AGUSPUTRA, S.STP.,M.AP

Penata

NIP. 19920101 201406 1 001

**KEPALA SUB BIDANG
PERENCANAAN DAN PEMBUKUAN PAD
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG**

SRI WAHYUNI, S.Sos.,M.AP

Penata Tk. I

NIP. 19720218 199803 2 003



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang

Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
www.bapenda.malangkota.go.id | email : bppd@malangkota.go.id

Malang 65132



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PAD
SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PEMBUKUAN PAD

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Perencanaan dan Pengembangan PAD)	1. Jumlah kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Perencanaan dan Pengembangan PAD)	1 Sub Kegiatan
2.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp 1.945.778.556,00
	Jumlah	Rp 1.945.778.556,00

Malang, Oktober 2023

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PAD
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOTA MALANG**

RIZAL AGUSPUTRA, S.STP.,M.AP
 Penata
 NIP. 19920101 201406 1 001

**KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBUKUAN PAD
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOTA MALANG**

SRI WAHYUNI, S.Sos.,M.AP
 Penata Tk. I
 NIP. 19720218 199803 2 003



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang

Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
www.bapenda.malangkota.go.id | email : bppd@malangkota.go.id

Malang 65132



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : KALYANA, SE
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : RIZAL AGUSPUTRA, S.STP.,M.AP
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PAD
Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Oktober 2023

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN PAD
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG**

RIZAL AGUSPUTRA, S.STP.,M.AP
Penata
NIP. 19920101 201406 1 001

**KEPALA SUB BIDANG
PENGEMBANGAN POTENSI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG**

KALYANA, SE
Penata
NIP. 19760318 200112 1 004



**PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang**

Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
www.bapenda.malangkota.go.id | email : bppd@malangkota.go.id

Malang 65132



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PAD
SUBBIDANG PENGEMBANGAN POTENSI**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Perencanaan dan Pengembangan PAD)	1. Jumlah kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Perencanaan dan Pengembangan PAD)	2 Sub Kegiatan
2.	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2. Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen
3.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 4. Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah yang terintegrasi dan terpelihara	4 Aplikasi

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 496.429.560,00
2	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah	Rp 778.804.816,00
	Jumlah	Rp 1.275.234.376,00

Malang, Oktober 2023

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN PAD
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG**

RIZAL AGUSPUTRA, S.STP.,M.AP
Penata
NIP. 19920101 201406 1 001

**KEPALA SUB BIDANG
PENGEMBANGAN POTENSI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG**

KALYANA, SE
Penata
NIP. 19760318 200112 1 004



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 MALANG Kode Pos 65132

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DWI HERMAWAN PURNOMO, S. STP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PAJAK DAERAH**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG**

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

MALANG, SEPTEMBER 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,


Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760607 199412 1 001

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,


DWI HERMAWAN PURNOMO, S. STP
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19800116 199810 1 001

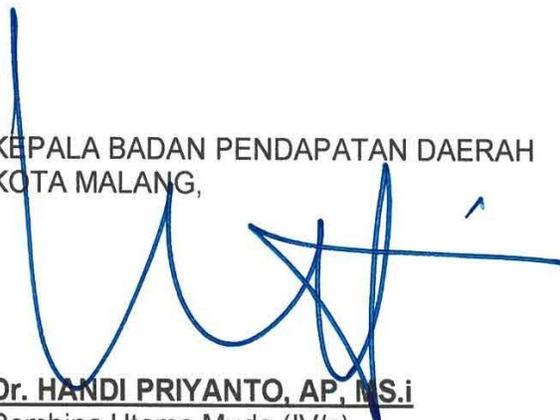
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 BIDANG PENGENDALIAN PAJAK DAERAH
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG**

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja Program (3)	Target (4)
1.	Menurunnya Piutang Pajak Daerah	Presentase Penurunan Piutang Pajak Daerah	26,21 %

Kegiatan
 Pengelolaan Pendapatan Daerah:

Rp. 6.742.498.144

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOTA MALANG,


Dr. HANDI PRIYANTO, AP, MS.i
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19760607 199412 1 001

MALANG, SEPTEMBER 2023

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
 PAJAK DAERAH
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOTA MALANG,


DWI HERMAWAN PURNOMO, S. STP
 Penata Tk.1 (III/d)
 NIP. 198001,16 199810 1 001



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 MALANG Kode Pos 65132

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. JAJA JAELANI**

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN, PENAGIHAN DAN PENINDAKAN

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **DWI HERMAWAN PURNOMO, S. STP**

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PAJAK DAERAH

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

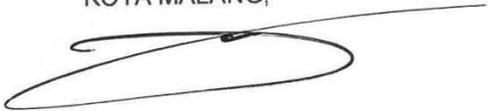
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

MALANG, SEPTEMBER 2023

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PAJAK
DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,

KEPALA SUB BIDANG
PENGAWASAN, PENAGIHAN
DAN PENINDAKAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,


DWI HERMAWAN PURNOMO, S. STP
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19800116 199810 1 001


Drs. JAJA JAELANI
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19680210 199203 1 009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 BIDANG PENGENDALIAN PAJAK DAERAH
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pengendalian Pajak Daerah)	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pengendalian Pajak Daerah)	2 Sub Kegiatan
2.	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2300 Dokumen
3.	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2500 Dokumen

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Rp. 363.755.136
2. Penagihan Piutang Pajak Daerah Rp. 3.134.887.120

Jumlah : Rp. 3.498.642.256

MALANG, SEPTEMBER 2023

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PAJAK
 DAERAH
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOTA MALANG,

KEPALA SUB BIDANG
 PENGAWASAN, PENAGIHAN DAN
 PENINDAKAN
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOTA MALANG,


DWI HERMAWAN PURNOMO, S. STP
 Penata Tk.1 (III/d)
 NIP. 19800116 199810 1 001


Drs. JAJA JAELANI
 Penata Tk. 1 (III/d)
 NIP. 19680210 199203 1 009



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 MALANG Kode Pos 65132

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TURUT SETIAJI, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN KEBERATAN**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **DWI HERMAWAN PURNOMO, S. STP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PAJAK DAERAH**

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

MALANG, SEPTEMBER 2023

**KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PAJAK
DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,**


DWI HERMAWAN PURNOMO, S. STP
Penata Tk.I (II/d)
NIP. 19800116 199810 1 001

**KEPALA SUB BIDANG
PEMBINAAN DAN KEBERATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,**


TURUT SETIAJI, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19760306 199703 1 005



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 MALANG Kode Pos 65132

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TURUT SETIAJI, SE**

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN KEBERATAN

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **DWI HERMAWAN PURNOMO, S. STP**

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PAJAK DAERAH

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

MALANG, SEPTEMBER 2023

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PAJAK
DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,


DWI HERMAWAN PURNOMO, S. STP
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19800116 199810 1 001

KEPALA SUB BIDANG
PEMBINAAN DAN KEBERATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,


TURUT SETIAJI, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19760306 199703 1 005



PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
Malang 65132

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGOES TRI HARTADI, S.Sos.M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

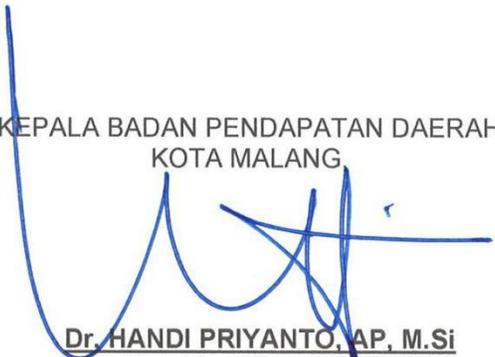
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Oktober 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG


Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19760607 199412 1 001

KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG


AGOES TRI HARTADI, S.Sos.M.Si

Pembina

NIP. 19710109 199101 1 001



PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
Malang 65132

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIDANG PAJAK DAERAH

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tercapainya Target Pajak Daerah	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	84,16%

Program / Kegiatan

Anggaran

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rp. 5.546.166.200,00

Malang, Oktober 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,

KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG


Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760607 199412 1 001


AGOES TRI HARTADI, S.Sos.M.Si
Pembina
NIP. 19710109 199101 1 001



PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
Malang 65132

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WALUYO SAFARI, SE, MM**

Jabatan : KEPALA SUB. BIDANG PAJAK DAERAH I

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **AGOES TRI HARTADI, S.Sos.M.Si**

Jabatan : KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Oktober 2023

KEPALA BIDANGPAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,


AGOES TRI HARTADI, S.Sos.M.Si
Pembina

NIP. 19710109 199101 1 001

KEPALA SUB. BIDANG PAJAK DAERAH I
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,


WALUYO SAFARI, SE, MM
Penata

NIP. 19741205 200312 1 004



**PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
Malang 65132

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PAJAK DAERAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Subbidang Pajak Daerah I	Jumlah jenis Pajak Daerah yang dikelola	2 Jenis Pajak
2	Terlaksananya Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan
3	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	18.000 Dokumen

Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah

Anggaran

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Rp. 758.667.040,00 |
| 2. Penetapan Wajib Pajak Daerah | Rp. 2.768.497.600,00 |
| Jumlah : | Rp. 3.527.164.640,00 |

Malang, Oktober 2023

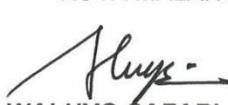
KEPALA BIDANGPAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,


AGOES TRI HARTADI, S.Sos.M.Si

Pembina

NIP. 19710109 199101 1 001

KEPALA SUB. BIDANG PAJAK DAERAH I
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,


WALUYO SAFARI, SE, MM

Penata

NIP. 19741205 200312 1 004



PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
Malang 65132

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAMDHANI ADHY PRADANA, S. STP.**
Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG PAJAK DAERAH II**
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **AGOES TRI HARTADI, S.Sos, M.Si.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH**
Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Oktober 2023

KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG


AGOES TRI HARTADI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19710109 199101 1 001

KEPALA SUB. BIDANG PAJAK DAERAH II
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG


RAMDHANI ADHY PRADANA, S. STP.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19930308 201507 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PAJAK DAERAH**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya data Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Lainnya yang sesuai	1.200 Wajib Pajak
2	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terverifikasinya Data Pelaporan Pajak Daerah Lainnya	40.000 Dokumen WP

Program / Kegiatan

Anggaran

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah II

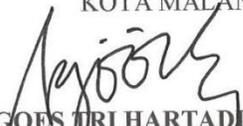
Rp. 1.200.863.040,00

2. Pemeliharaan dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Rp. 818.138.520,00

Malang, Oktober 2023

KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,


AGOES TRI HARTADI, S.Sos, M.Si.

Pembina

NIP. 19710109 199101 1 001

KEPALA SUB. BIDANG PAJAK DAERAH II
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,


RAMDHANI ADHY PRADANA, S. STP.

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19930308 201507 1 001

LAMPIRAN V

Tindak Lanjut Rekomendasi LHE SAKIP 2023

FORM EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT REKOMENDASI LHE SAKIP TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PELAKSANAAN		DOKUMEN PENDUKUNG	
			SUDAH	BELUM	ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mengoptimalkan penyajian dokumen seluruh komponen SAKIP dan diunggah pada aplikasi Kemenpan RB (https://esr.menpan.go.id) secara berkelanjutan 5 (lima) tahun terakhir untuk meningkatkan capaian nilai tiap komponen	Bukti dukung telah dihimpun secara berkelanjutan dalam link google drive untuk selanjutnya diunggah ke aplikasi ESR Kemenpan RB	V		V	
2.	Mempublikasi setiap inovasi dan penghargaan nominasi regional maupun nasional dalam website resmi perangkat daerah	Screenshot publikasi inovasi dan penghargaan pada website resmi perangkat daerah.	V		V	

Malang, 21 Juli 2023

KETUA BADAN PENDAPATAN DAERAH



Dr. HANDI PRIYANTO, AP. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19760607 199412 1 001

Bukti dukung telah dihimpun secara berkelanjutan dalam link google drive untuk selanjutnya diunggah ke aplikasi ESR Kemenpasn RB



<https://bit.ly/SAKIP-Bapenda>

Screenshoot Publikasi Inovasi dan Penghargaan pada Website Resmi Perangkat Daerah

